

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai kedudukan hukum bank setelah dicabutnya izin usaha serta menganalisa mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal jangka waktu pencairan aset sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin, Pembubaran, dan Likuidasi Bank maupun UU Nomor 24 Tahun 2004 Lembaga Penjamin Simpanan telah terlampaui. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah kewenangan bank yang telah dicabut izin usahanya hanya sebatas kepada pelaksanaan proses likuidasi saja, tidak dapat menyentuk kegiatan perbankan seperti sebelum dicabutnya izin usaha. Selain itu apabila jangka waktu pencairan aset telah terlampaui, dalam hal ini baik Lembaga Penjamin Simpanan maupun Otoritas Jasa Keuangan dapat menggunakan sarana diskresi dalam rangka pembentukan praturan Lembaga Penjamin Simpanan maupun Otoritas Jasa Keuangan untuk mengisi kekosongan hukum yang sedang dihadapi. Namun dalam pelaksanaan atau penerapan diskresi tersebut tetap harus mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Keyword : likuidasi bank, kedudukan hukum bank, proses likuidasi, diskresi.